



Pertimbangkan Status Darurat

Langkah Konkret Tangani Wabah PMK

BUTUH PENANGANAN

Wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) terus meluas.

Pemerintah DIY menegaskan perlunya langkah konkret, utamanya sudah ada keputusan mengenai status darurat.

Penularan wabah lebih cepat dan lebih besar dibandingkan tahun lalu.

Pemetaan status darurat diperlukan agar anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) dapat digunakan secara optimal.

Kepulauan ini harus berdasarkan kajian epidemiologi yang mendalam.

Jika status darurat ditetapkan, proses pengisian vaksin dapat dipercepat.

Kajian ini akan menjadi dasar penting sebelum memutuskan langkah tersebut.

1000 KASUS TERTANGAN

Saat ini baru sekitar 1.000 dari total 1.500-an kasus yang terungkap.

20.000 DOSIS

Pemkab Gunungkidul akan melakukan pembelian vaksin PMK sebanyak 20 ribu dosis. Wabah berdampak pada kesejahteraan ekonomi peternak.

Perdagangan Ternak Lesu

PEDAGANG sapi di Kabupaten Sleman gelisah karena harga pasaran sapi anjak hingga Rp2 juta per ekor. Hal ini dampak dari penyebaran wabah PMK yang menyengat ternak berisiko telah.

Harga sapi yang merosot tentu berdampak pada pendapatan. Hayitno, pedagang sapi di Pasar Hewan Ambarharjo, Kabupaten Sleman mengatakan keresahannya. Menurut dia, selain harga jual yang me-

rosot, penjualan ternak juga lesu karena transaksi mengalami penurunan.

"Sekarang cuma bisa satu sapi (untuk dijual). Karena kondisinya seperti ini, jualan susah. Biasanya bisa 4-5 ekor laku semua," katanya, Jumat (10/1).

Sementara itu, pedagang kambing PMK, harga sapi menurun, ia menceritakan, jika biasanya satu ekor sapi bisa laku terjual hingga Rp10 juta namun kali ini dengan kualitas yang sama cuma di-harga Rp8-8,5 juta.

Bayono memimpin, untuk pasaran kali ini ia dan suaminya, Prayitno membawa satu ekor sapi. Sapi telah laku terjual tetapi keuntungan yang didapat sangat minim karena harganya anjak.

lanjut Tidak Terduga (BTT) dapat digunakan secara optimal. Namun, keputusan ini harus berdasarkan kajian epidemiologi yang mendalam.

"Jika status darurat ditetapkan, proses pengisian vaksin dapat dipercepat. Kajian ini akan menjadi dasar penting sebelum memutuskan langkah konkret," tambahnya.

Lebih lanjut, Berry mengatakan, wabah PMK telah menyebar ke empat kabupaten di luar Kota Yogyakarta. Kondisi ini mendorong pemerintah untuk segera mengambil tindakan konkret.

• halaman 7

Pertimbangkan

● Sambungan Hal 1

"Kepala dinas terkait saya minta selambat-lambatnya Senin (13/1) mendatang sudah ada keputusan mengenai status darurat. Jika dinyatakan darurat, Pemda DIY akan mempercepat pengadaan vaksin melalui e-catalog dan menjalin kerja sama dengan *Corporate Social Responsibility* (CSR) untuk mendukung penanganan wabah ini," jelas Beny.

Ia menambahkan, saat ini baru sekitar 1.000 dari total 1.800-an kasus yang tertangani. Hal ini menunjukkan urgensi untuk bergerak cepat dalam menangani wabah demi melindungi kesehatan ternak serta perekonomian masyarakat yang terdampak.

Kolaborasi

Beny juga menyoroti pentingnya menjaga kebersihan di pasar dan lokasi yang berhubungan langsung dengan ternak sebagai langkah pencegahan. Ia menyebut perlunya keterlibatan institusi akademis dan balai veteriner dalam memberikan solusi di lapangan.

"Kami (DIY) memiliki fakultas peternakan dan balai veteriner yang siap turun untuk membantu memberikan edukasi dan solusi langsung," ujarnya.

Kolaborasi lintas sektor juga diharapkan dapat mempercepat penanganan wabah. Dengan langkah cepat dan sinergi yang kuat, Pemda DIY berharap dampak wabah PMK terhadap kesehatan ternak dan ekonomi masyarakat dapat diminimalkan.

Adapun, pembatasan lalu lintas ternak di DIY yang

direncanakan untuk menanggulangi PMK masih menunggu instruksi resmi dari Gubernur DIY. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) DIY, Syam Arjayanti, menjelaskan, dalam draf instruksi gubernur, pembatasan lalu lintas ternak sudah dimasukkan. Namun, hingga saat ini, Ingub tersebut masih berada di Biro Hukum Setda DIY dan menunggu persetujuan dari Gubernur DIY.

Syam berharap instruksi gubernur tersebut dapat segera terbit, dengan target keluar pada minggu depan. Pembatasan lalu lintas ternak ini menjadi langkah penting dalam mencegah penyebaran PMK yang semakin meluas di wilayah DIY.

Sebagai langkah pencegahan, DPKP DIY juga telah menjalin komunikasi dengan Polda dan Korem untuk membantu pengawasan lalu lintas ternak di wilayah tersebut. Meskipun vaksinasi massal dari Kementerian Pertanian telah selesai dilakukan, Syam menambahkan bahwa pihaknya sedang berusaha memperoleh tambahan vaksin dari dana *Corporate Social Responsibility* (CSR).

"Vaksinasi massal dari kementerian baru akan dilaksanakan pada Februari atau Maret, jadi kami berupaya mencari solusi vaksin tambahan melalui CSR," ujarnya.

Syam juga berharap agar kabupaten dan kota di DIY dapat melaksanakan vaksinasi secara mandiri untuk mempercepat penanganan wabah PMK.

Stok kosong

Sementara itu, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (DPKH) Kabupaten Gunung-

kidul mengajukan tambahan vaksin PMK sebanyak 20 ribu dosis. Kepala DPKH Gunungkidul Wibawapti Wulandari mengatakan permohonan tambahan vaksin itu diajukan ke Kementerian Pertanian (Kementan) RI. Pasalnya, stok vaksin yang dimiliki Pemkab Gunungkidul sudah kosong.

"Stok vaksin PMK yang kami miliki itu terakhir hanya tersisa 375 dosis saja, dan itu semua sudah habis disuntikan ke ternak," ujarnya pada Jumat (10/1).

Ia menjelaskan, tambahan vaksin itu nantinya diperuntukkan bagi ternak yang belum pernah divaksinasi PMK, seperti anakan, ataupun untuk penguat (*booster*) ternak yang sudah pernah divaksin. Adapun, prioritas vaksinasi pada ternak sapi karena kasus PMK saat ini hanya menyerang ternak tersebut.

"Saat ini, dari data yang kami lakukan sudah sekitar 70 ribu ternak sudah divaksin, sedangkan total ternak di Kabupaten Gunungkidul itu mencapai 130 ribu ekor. Sehingga, agar tercipta imunitas pelindung maka paling tidak 80 persen dari total populasi hewan ternak harus mendapatkan vaksin," ungkapnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Gunungkidul Sri Surhantata mengatakan saat ini penanganan wabah PMK difokuskan pada pemberian vaksinasi dan disinfektan terhadap hewan-hewan yang masih sehat.

"Kami belum ada niatan untuk melakukan penerapan kejadian luar biasa (KLB). Sebab, kami masih mengupayakan penanganan vaksinasi bagi hewan yang masih sehat kemudian disinfektan di pa-

sar, serta pengobatan untuk hewan yang sudah terpapar PMK," ujarnya.

Selain itu, pihaknya juga melakukan pengamatan terhadap lalu lintas hewan untuk memastikan hewan ternak yang masuk ke Gunungkidul dalam keadaan sehat. Adapun, pengamatan yakni melakukan *screening* misalnya hewan yang masuk wajib ada surat keterangan asal usul hewan, hewan harus sehat, dan hewan yang masuk ke pasar harus disemprot disinfektan.

Sementara, berdasarkan data DPKH Gunungkidul per 5 Oktober 2025, jumlah ternak yang terjangkit penyakit mulut dan kuku (PMK) di wilayahnya mencapai 893 kasus dengan kematian sebanyak 63 kasus.

Plt Kepala Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan (DP3) Kabupaten Sleman, Suparmono mengatakan, kasus PMK mengalami tren kenaikan cukup signifikan di akhir tahun dan awal tahun 2025. Hasil pendataan yang dilakukan dari bulan Februari 2024 hingga Januari 2025 ditemukan total kasus ternak sakit akibat PMK 556 ekor. Dari jumlah tersebut 301 ekor sembuh, 28 ekor mati dan 6 persen di antaranya di potong paksa.

Ia mengklaim tingkat kesembuhan ternak sakit akibat PMK di Sleman di angka 54 persen. Jumlah, tersebut cukup tinggi karena faktor vaksinasi yang terus berjalan. "Jadi kalau melihat data itu memang PMK muncul kembali di Sleman namun relatif terkendali. Tingkat kematian rendah dan kesembuhan tinggi. Ini karena ada faktor vaksinasi yang terus dilakukan," katanya. (han/ndg/rit)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pertanian dan Pangan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 07 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005